



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 000.8.6.3/8/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024-2026

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

16871

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 tanggal 30 Maret Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

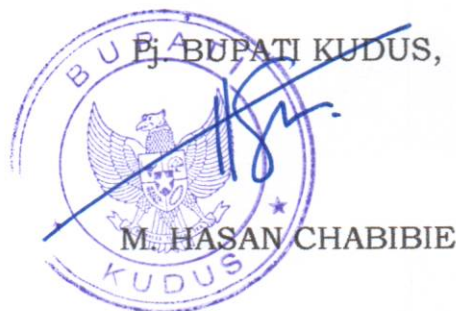
Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, terdiri dari:
- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
 - b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

17/7/23

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah untuk:
- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
 - c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja;
 - d. pengukuran kinerja;
 - e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor : 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 061/91/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor : 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Januari 2024



Tembusan:

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

25/1

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 11 Januari 2024
Nomor : 000.8.G.3/8/2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya daya saing Sumber Daya manusia (SDM)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	a. Formulasi pengukuran : Rata-rata geometrik dari Indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bappeda
2.		SDM yang berkualitas dan berbudaya	Indeks Pendidikan	a. Formulasi pengukuran : $(\text{Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS)} + \text{Rata-rata Lama Sekolah (RLS)}) \div 2$ b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olahraga
3.			Angka Stunting	a. Formulasi pengukuran : Jumlah balita dengan kategori stunting (pendek dan sangat pendek) dari hasil pengukuran tinggi badan per umur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah balita yang diukur pada wilayah dan kurun waktu yang sama dikali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
4.			Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	a. Formulasi pengukuran : Rata-rata dari nilai tujuh variabel indeks kelompok indikator (sub indeks) atau Jumlah total nilai tujuh variabel indeks kelompok indikator (sub indeks) dibagi 7 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kemendes dan Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan



5.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	a. Formulasi pengukuran : Perbandingan antara rata-rata dari perhitungan garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita dan jumlah penduduk b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bappeda
6.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Mandiri	a. Formulasi pengukuran : Jumlah PPKS Mandiri dibagi Jumlah PPKS ditahun yang sama dikali 100 % b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	a. Formulasi pengukuran : Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 % b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Pendapatan Per Kapita	a. Formulasi pengukuran : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB dibagi Jumlah Penduduk b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bappeda
9.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tanpa Industri Hasil Tembaku	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembaku	a. Formulasi pengukuran : ((PDRB tanpa IHT Tahun n - PDRB tanpa IHT Tahun n-1) dibagi PDRB Tanpa IHT Tahun n-1) X 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bappeda
10.	Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif	Realisasi Investasi	a. Formulasi pengukuran : Jumlah modal dibagi investasi oleh penanam modal atau pelaku usaha yang ada di wilayah tertentu pada internal waktu tertentu b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

As 74

11.	Pembangunan wilayah yang berkelanjutan untuk masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	a. Formulasi pengukuran : $\frac{1}{3}(\text{IKS} \times \text{IKE} \times \text{IKL})$; IKS = Indeks Sosial, IKE = Indeks Ekonomi, IKL = Indeks Lingkungan b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
12.		Indeks Pembangunan Kecamatan	a. Formulasi pengukuran : $(\sum \% \text{IKM} \text{Kec} + \sum \% \text{Adm Desa} + \sum \% \text{Kelembagaan Desa} + \sum \% \text{Pemb.Masyarakat Desa})/4$ b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	9 Kecamatan Kabupaten Kudus	9 Kecamatan Kabupaten Kudus
13.	Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk masyarakat	Menguatnya kebudayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	a. Formulasi pengukuran : Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah desa di Kabupaten Kudus dikali 100 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14.	Menurunkan Risiko Bencana di Daerah	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	a. Formulasi pengukuran : Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan faktor Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas. RISIKO BENCANA = (HAZARDS X VULNERABILITY)/CAPACITY b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.		Meningkatnya kecondusifan wilayah	a. Formulasi pengukuran : Konflik sosial yang diselesaikan dibagi dengan konflik sosial yang terindikasi b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Kesbangpol	Kepala Badan Kesbangpol
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	a. Formulasi pengukuran : $(37,60\% \times \text{IKA}) + (40,50\% \times \text{IKU}) + (21,90\% \times \text{IKTL})$ dengan $\text{IKA} = \text{Indeks Kualitas Air}$; $\text{IKU} = \text{Indeks Kualitas Udara}$; $\text{IKTL} = \text{Indeks Kualitas}$ b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

21/11

17.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi dari KemenPAN RB b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
18.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	a. Formulasi pengukuran : Indeks untuk kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang terdiri dari 6 Dimensi : 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 3. Transparasi pengelolaan keuangan daerah 4. Penyerapan anggaran 5. Kondisi keuangan daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kementerian Dalam Negeri	Kepala BPPKAD
19.		Meningkatnya akuntabilitas dan integritas Pemerintah	Nilai SAKIP	a. Formulasi pengukuran : Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dari Kementerian PAN RB b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
20.			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	a. Formulasi pengukuran : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari KemenPAN RB b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)


BUPA BURATI KUDUS,
M. HASAN CHABIBIE



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 11 Januari 2024
Nomor : 000.8.6.3/8/2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

A. DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya SDM yang berkualitas	a. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan	Rata - rata Harapan Lama Sekolah (HLS)	a. Formulasi pengukuran : lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Pusat Statistik (BPS)	Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga
2.			Rata - rata lama sekolah (RLS)	a. Formulasi pengukuran : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Pusat Statistik (BPS)	Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga
3.	Meningkatnya prestasi Olahraga dan Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	a. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam Pembangunan Daerah	a. Formulasi pengukuran : Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kemudaan th N dibagi persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kemudaan th N-1 kali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Bidang Kemudaan Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga	Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga
4.		b. Meningkatnya pembinaan Olahraga	Persentase cabang olahraga yang diikuti	a. Formulasi pengukuran : Jumlah cabang olahraga yang diikuti dibagi cabang olahraga keseluruhan dikali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Bidang Olahraga Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga	Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga
5.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga

891

B. DINAS KESEHATAN DAN RSUD DR. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Balita (AKBa)	a. Formulasi pengukuran : Banyaknya kematian balita (dibawah 5 Tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
2.			Angka Kematian Bayi (AKB)	a. Formulasi pengukuran : Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 Tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
3.			Angka Kematian Ibu (AKI)	a. Formulasi pengukuran : Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
4.			Indeks Keluarga Sehat (IKS)	a. Formulasi pengukuran : Angka hasil perhitungan dari kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dengan nilai skala 0-1 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
5.		b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan	Nilai Akreditasi (RSUD)	a. Formulasi pengukuran : Hasil penilaian pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan manajemen oleh tim akreditasi RS standart kemenkes b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	RSUD dr. Loekmono Hadi	Direktur

2891

6.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Kesehatan
7.			Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (RSUD)	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Direktur

2671

C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum pendukung perekonomian	a. Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks pekerjaan umum	a. Formulasi pengukuran : Jumlah infrastruktur jalan, jembatan , drainase dan Irigasi dalam kondisi baik di bagi total infrastruktur kewenangan kabupaten kali 100 % b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.		b. Meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi aman	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan air limbah domestik	a. Formulasi pengukuran : Jumlah warga berakses Sanitasi Layak dibagi jumlah warga kabupaten kudus dikali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.			Persentase Rumah tangga berakses Sanitasi aman	a. Formulasi pengukuran : Jumlah rumah tangga berakses sanitasi aman dibagi jumlah Rumah Tangga dikali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.			Persentase Rumah tangga berakses air minum aman	a. Formulasi pengukuran :Jumlah rumah tangga berakses air minum aman dibagi jumlah Rumah Tangga dikali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.			Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari	a. Formulasi pengukuran : Jumlah rumah warga berakses air minum layak dibagi jumlah warga kabupaten kudus dikali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Handwritten signature/initials.

6.		c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	a. Formulasi pengukuran : Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang ditambah persentase ketersediaan dokumen SPPR ditambah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dibagi 3 dikali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.		Meningkatnya penyelesaian tanah yang terkena pembangunan kepentingan untuk umum	Persentase penyelesaian tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	a. Formulasi pengukuran : luas tanah yang dokumen administrasinya terselesaikan dibagi luas tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dikali 100 % b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Handwritten signature

D. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HUDDUP KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya permukiman layak huni	a. Meningkatkan akses rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	a. Formulasi pengukuran : Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2.		b. Meningkatkan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	Persentase luas permukiman kumuh	a. Formulasi pengukuran : Luas lingkungan permukiman kumuh dibagi Luas wilayah X 100 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas air (IKA)	a. Formulasi pengukuran : Perhitungan melalui web https://ppkl.menlhk.go.id/iklh b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
4.			Indeks Kualitas udara (IKU)	a. Formulasi pengukuran : Perhitungan melalui web https://ppkl.menlhk.go.id/iklh b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
5.			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	a. Formulasi pengukuran : Perhitungan melalui web https://ppkl.menlhk.go.id/iklh b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
6.		b. Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	a. Formulasi pengukuran : Jumlah sampah yang dikelola dibagi jumlah potensi timbunan sampah Kabupaten x 100 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
7.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Ats gh

E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kecondusifan wilayah	a. Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	a. Formulasi pengukuran : Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) terdiri dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.			Presentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	a. Formulasi pengukuran : Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh gangguan x 100 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

89h

F. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunnya Risiko Bencana di Daerah	a. Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	a. Formulasi pengukuran : Ukuran kapasitas daerah penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota (7 parameter, 7 Prioritas dan 71 indikator Penilaian) yang dikeluarkan oleh BNPB b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

28/11

G. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	a. Peningkatan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	a. Formulasi pengukuran : $IPM \text{ Perempuan} \div \text{dibagi } IPM \text{ Laki-laki} \times 100$ b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Sosial P3A P2 KB	Kepala Dinas Sosial P3A P2 KB
		b. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sosial)	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tergradiasi	a. Formulasi pengukuran : Jumlah PPKS yang tergradiasi setelah mendapat bantuan sosial dibagi Jumlah PPKS yang mendapat bantuan sosial $\times 100$ b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Sosial P3A P2 KB	Kepala Dinas Sosial P3A P2 KB
3.	Meningkatnya kualitas hidup	a. Peningkatan Kesetaraan	Indeks Pemberdayaan	a. Formulasi pengukuran : BPS Provinsi b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Sosial P3A P2 KB	Kepala Dinas Sosial P3A P2 KB
4.	Meningkatnya pengendalian Penduduk	a. Peningkatan Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pemahanan Kesehatan	Strata Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	a. Formulasi pengukuran : Jumlah Penduduk tahun n dibagi jumlah penduduk tahun n-1 pangkat 1 minus 1 $\times 100$ b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Sosial P3A P2 KB	Kepala Dinas Sosial P3A P2 KB
5.			Total Fertility Rate (TFR)	a. Formulasi pengukuran : $5x \text{ (ASFR } 15-19 \text{ th} + \text{ ASFR } 20-24 \text{ th} + \text{ ASFR } 25-29 \text{ th} + \text{ ASFR } 30-34 \text{ th} + \text{ ASFR } 30-39 \text{ th} + \text{ ASFR } 40-44 \text{ th} + \text{ ASFR } 45-49 \text{ th}) / 1000$ b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Sosial P3A P2 KB	Kepala Dinas Sosial P3A P2 KB
6.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Sosial P3A P2 KB

Asy

H. DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunnya Pengangguran	a. Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	a. Formulasi pengukuran : Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja kali 100 % b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Pusat Statistik (BPS)	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.	Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Non IHT terhadap PDRB	a. Meningkatkan Kualitas Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	a. Formulasi pengukuran : Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (berdasarkan RAT, volume usaha dan aset) dibagi Jumlah seluruh koperasi kali 100 % b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.		b. Meningkatkan Pertumbuhan Omzet Usaha	Persentase usaha mikro yang meningkat omzet usahanya	a. Formulasi pengukuran : Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya dibagi jumlah usaha mikro yang difasilitasi kali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.		c. Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	a. Formulasi pengukuran : Jumlah IKM tahun n dikurangi jumlah IKM tahun lalu dibagi Jumlah IKM Tahun lalu kali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Handwritten signature/initials.

I. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	a. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	a. Formulasi pengukuran : (cakupan kepemilikan KTP + cakupan kepemilikan KIA + cakupan kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 tahun _ cakupan kepemilikan Akta Kematian + cakupan kepemilikan Akta Perkawinan + cakupan kepemilikan Akta Percetaian) dibagi 6 b. Tipe Perhitungan : Kumulatif	Dinas Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.		b. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase Perangkat Daerah pengguna hak akses data kependudukan sesuai standar	a. Formulasi pengukuran : Jumlah Perangkat Daerah pengguna hak akses data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dibagi dengan jumlah total Perangkat Daerah di suatu wilayah Kabupaten dikali 100% b. Tipe Perhitungan : Kumulatif	Dinas Dukcapil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

At 71

J. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	a. Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	Persentase Desa Mandiri	a. Formulasi pengukuran : Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah desa di Kabupaten Kudus dikali 100 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	a. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan desa	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Formulasi pengukuran : Hasil Penilaian atas variabel disiplin dan penyelenggaraan pemdes (Perencanaan, Keuangan, Aset, Lembaga Desa, Lembaga Masyarakat Desa) b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Atsya

K. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Handal Pendukung Iklim Investasi	a. Meningkatkan Kenyamanan Dan Keselamatan Transportasi	Indeks Fatalitas per 100rb penduduk	a. Formulasi pengukuran : Jumlah orang meninggal karena laka lantas dibagi jumlah penduduk dikali 100 ribu . b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Polres Kudus Dukcapil Kabupaten Kudus	Kepala Dinas Perhubungan
2.			Indeks Fatalitas per 10rb kendaraan	a. Formulasi pengukuran : Jumlah orang meninggal karena laka lantas dibagi jumlah kendaraan dikali 10 ribu b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Polres Kudus Samsat Kudus	Kepala Dinas Perhubungan
3.			V/C ratio jalan utama pada jam sibuk	a. Formulasi pengukuran : Rata-rata volume lalu lintas di ruas jalan utama pada jam sibuk dibagi kapasitas ruas jalan b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
4.			Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	a. Formulasi pengukuran : Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten/Kota dibagi b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
5.			Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Perhubungan

2021

L. DINAS KOMINIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	a. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks SPBE	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi KemendPAN RB b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.		b. Meningkatkan akses terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

2691

M. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terciptanya Iklim investasi yang kondusif	a. Meningkatkan daya tarik investasi	Investor yang merealisasikan investasinya	a. Formulasi pengukuran : Jumlah Investor yang sudah mendapatkan legalitas usaha b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

591

N. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Partisipasi Budaya Masyarakat	a. Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	a. Formulasi pengukuran : Rata-rata (Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan ditambah persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan) dibagi 2 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	a. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisata	a. Formulasi pengukuran : Jumlah Kunjungan Wisatawan b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

289p

O. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya literasi masyarakat	a. Meningkatkan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	a. Formulasi pengukuran : Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM), UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan, UPLM 2= Ketercukupan koleksi, UPLM 3= Ketercukupan tenaga perpustakaan, UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, UPLM 5 = peperustakaan ber NSP, UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, UPLM 7 = Anggota perpustakaan b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.			Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun	a. Formulasi pengukuran : Jumlah pengunjung perpustakaan Umum Daerah selama 1 tahun b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	a. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip	Indeks Kearsipan Daerah	a. Formulasi pengukuran : 1.Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan 2.Indeks Ketersediaan Arsip 3.Indeks Pelayanan arsip 4.IRB Indeks kearsipan = (1+2+3+4)/4 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Handwritten signature

4.			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	a. Formulasi pengukuran : $T = (m + b + g + a + c + i)/6$, T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota dengan NSPK, a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, c = Tingkat Kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5.			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	a. Formulasi pengukuran : $T = (a + i + s + j)/4$, T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

891

P. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya konsumsi pangan yang berkualitas	a. Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang berkualitas	Angka ketersediaan energi	a. Formulasi pengukuran : Jumlah kalori tersedia dibagi jumlah penduduk dibagi jumlah hari b. Tipe Perhitungan : Kumulatif	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
2.			Skor PPH Ketersediaan	a. Formulasi pengukuran : Skor PPH Ketersediaan b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
3.	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan terhadap PDRB	a. Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Hasil Perikanan	a. Formulasi pengukuran : Jumlah Produksi hasil perikanan budidaya + perikanan tangkap b. Tipe Perhitungan : Kumulatif	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
4.		b. Meningkatnya produksi pertanian	Produktivitas tananaman padi	a. Formulasi pengukuran : Jumlah produksi tanaman padi dibagi luas panen padi b. Tipe Perhitungan : Kumulatif	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
5.			Produktivitas tananaman tebu	a. Formulasi pengukuran : Jumlah produksi tanaman tebu dibagi luas panen tebu b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
6.			Jumlah Produksi Peternakan	a. Formulasi pengukuran : Jumlah produksi asal ternak (Daging, Telur dan Susu) b. Tipe Perhitungan : Kumulatif	Dinas Pertanian dan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
7.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

2871

Q. DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan	a. Meningkatkan pertumbuhan Lapangan	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha	a. Formulasi pengukuran : PDRB Sektor Perdagangan dibagi total PDRB kali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	BPS	Kepala Dinas Perdagangan
2.		b meningkatkan volume perdagangan	Nilai Ekspor	a. Formulasi pengukuran : Nilai Ekspor Non Migas b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan
3.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Perdagangan

26/11

R. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pembangunan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi dari KemPAN RB b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Sekretaris Daerah
2.			Maturnitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terintegrasi	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi dari BPKP b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)	Sekretaris Daerah
3.			Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi dari Kemendagri b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Sekretariat Daerah (Bagian Pmerintahan)	Sekretaris Daerah
4.			Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Sekretaris Daerah

2881

S. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TYPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kinerja Lembaga DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	a. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Kinerja DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kinerja DPRD	a. Formulasi pengukuran : Hasil Nilai Indeks Survei IKM atas Kinerja DPRD b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
2.		b. Meningkatkan kapasitas Lembaga DPRD dalam menyusun Peraturan Daerah	Persentase Ranperda yang disahkan	a. Formulasi pengukuran : Jumlah Ranperda yang disetujui bersama dibagi jumlah Ranperda yang dibahas x 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
3.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Sekretaris DPRD

29/1

T. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatkan kualitas Perencanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	a. Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Pemda ditambah Tingkat Capaian Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi dua b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Bappeda	Kepala Bappeda
2.		b. Terwujudnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	a. Formulasi pengukuran : Pengukuran skor indeks inovasi dari kemandagri b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Bappeda	Kepala Bappeda
3.		c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Bappeda

12591

U. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	a. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	a. Formulasi pengukuran : PAD dibagi Total Pendapatan dikali 100% b. Tipe Perhitungan : Kumulatif	BPPKAD	Kepala BPPKAD
2.		b. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	a. Formulasi pengukuran : Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	BPPKAD	Kepala BPPKAD
3.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala BPPKAD

591

V. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Profesionalisme ASN		Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN)	a. Formulasi pengukuran : $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan : IP : Indeks Profesionalisme IP₁ : Indeks Profesionalisme ke-1 IP₂ : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₃ : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₄ : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	BKPSDM	Kepala BKPSDM
2.		a. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN	Indeks Penerapan Sistem Merit	a. Formulasi pengukuran : Akumulasi indeks sistem merit kriteria Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian Penghargaan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	BKPSDM	Kepala BKPSDM
3.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala BKPSDM

191

W. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kekondusifan Wilayah	a. Meningkatkan Harmoni Sosial	Angka Konflik Sosial	a. Formulasi pengukuran : Jumlah konflik sosial yang terjadi pada tahun berjalan dikurangi jumlah konflik sosial tahun lalu b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Kesbangpol	Kepala Badan Kesbangpol
2.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase potensi konflik dan gangguan yang tertangani	a. Formulasi pengukuran : Jumlah potensi konflik dan gangguan yang tertangani dibagi total konflik dan gangguan x 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Badan Kesbangpol	Kepala Badan Kesbangpol
			Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Kepala Badan Kesbangpol

2698

X. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TYPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pengawasan Pemerintah Daerah	a. Meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai IEPK (Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi)	a. Formulasi pengukuran : Hasil Penilaian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jateng b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah
2.		b. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	a. Formulasi pengukuran : Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jateng b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah
3.			Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah

Ats

Y. KECAMATAN KABUPATEN KUDUS

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menguatnya Keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	a. Meningkatkan kualitas layanan kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	a. Formulasi pengukuran : Hasil Nilai Survei IKM atas produk Layanan Kecamatan b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kecamatan	Camat
2.			Persentase administrasi desa yang sesuai standar	a. Formulasi pengukuran : Jumlah Desa Tertib Administrasi dibagi Jumlah Desa dikali 100% b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kecamatan	Camat
3.			Persentase pembangunan masyarakat desa yang berkualitas	a. Formulasi pengukuran : Persentase dukungan SPM Bidang trantibum dan kebencanaan yang teralisasi + persentase konflik yang tertangani dibagi 2 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kecamatan	Camat
3.			Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik	a. Formulasi pengukuran : Jumlah Desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif dan beradministrasi baik dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dikali 100 b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Kecamatan	Camat
4.	Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik	b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Formulasi pengukuran : Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah b. Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Inspektorat Daerah	Camat



2891